



Pengembangan Potensi Ekonomi Dalam Penguatan Daya Saing Kota Sungai Penuh

Development of Economic Potential In Strengthening Competitiveness of Sungai Penuh City

Heppi Syofya^{*)}

STIE Sakti Alam Kerinci, Sungai Penuh, Indonesia

^{*)} email: hsyofya@gmail.com

Article Info

Article history:

Received: November 2017

Accepted: November 2017

Published: Desember 2017

Keywords:

Economic sector,

Economic development

Abstrak

Terbatasnya sumberdaya pembangunan maka kebijakan pembangunan yang diambil adalah menentukan daerah-daerah tertentu sebagai pusat-pusat pertumbuhan. Sedangkan bagi bukan daerah pusat pertumbuhan, dampak negatif yang ditimbulkan adalah terserapnya sumberdaya pembangunan (seperti modal dan tenaga kerja ahli) ke daerah pusat pertumbuhan. Akibatnya kegiatan ekonomi terkonsentrasi (teraglomerasi) di daerah perkotaan (pusat pertumbuhan), akibatnya *trickle down* effect yang diharapkan tidak tercipta. Fenomena tersebut mengindikasikan tidak ada pergerakan pertumbuhan ekonomi dari pusat pertumbuhan (kota) ke daerah bukan pusat pertumbuhan (desa), bahkan justru memperparah kesenjangan ekonomi antar daerah, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, pengembangan sektor pembangunan Kota Sungai Penuh untuk kedepannya adalah menentukan sektor potensial serta melihat pengembangan sektor potensial untuk mendukung daya saing di Kota Sungai Penuh.

Abstract

The Limited development resources then the development policy taken is to determine certain areas as growth centres. As for non-central growth areas, the negative impacts are the absorption of development resources (such as capital and skilled labour) into the central areas of growth. As a result economic activity is concentrated (agglomerated) in urban areas (growth centres), consequently trickle-down effect is not expected to be created. This phenomenon indicates that there is no movement of economic growth from the growth center (city) to the non-growth (villages), and even exacerbate the economic gap between regions, this research uses descriptive quantitative method, development of Sungai Penuh's development sector for the future is determining the potential sector as well as looking at potential sector development to support competitiveness in Sungai Penuh city

PENDAHULUAN

Indonesia yang tergolong sebagai negara sedang berkembang, pada awal proses pembangunannya lebih cenderung untuk memilih atau mengarah pada strategi pembangunan ekonomi tidak seimbang. Pemilihan strategi tersebut bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan dalam proses pembangunan, misalnya mendorong sektor industri menjadi sektor pemimpin (*leading sector*), sehingga bisa mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain. Selain itu dalam konteks spasial (ruang) dengan terbatasnya sumberdaya pembangunan maka kebijakan pembangunan yang diambil adalah menentukan daerah-daerah tertentu sebagai pusat-pusat pertumbuhan. Sedangkan bagi bukan daerah pusat pertumbuhan, dampak negatif yang ditimbulkan adalah terserapnya sumberdaya pembangunan (seperti modal dan tenaga kerja ahli) ke daerah pusat pertumbuhan. Akibatnya kegiatan ekonomi terkonsentrasi (teraglomerasi) di daerah perkotaan (pusat pertumbuhan), akibatnya *trickle down effect* yang diharapkan tidak tercipta. Fenomena tersebut mengindikasikan tidak ada pergerakan pertumbuhan ekonomi dari pusat pertumbuhan (kota) ke daerah bukan pusat pertumbuhan (desa), bahkan justru memperparah kesenjangan ekonomi antar daerah. Dengan kata lain, kebijakan pembangunan regional telah membentuk daerah-daerah nodal. Daerah nodal adalah areal-areal yang strukturalnya terdiri dari atas areal inti dengan areal-areal sekitarnya yang melingkupi, dalam arti ekonomi yang terpadu dengan areal inti itu (Soepono, 2000).

Pemerataan pembangunan telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang menyatakan bahwa fungsi sekaligus tujuan Negara Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum. Salah satu proses pencapaian tersebut adalah melalui pembangunan. Menurut Tjokroamidjojo (2002: 4) pembangunan adalah upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik, sesuai dengan pandangan masyarakat itu, pembangunan dimaksudkan agar ada perubahan positif yang terjadi dalam semua bidang, baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur dan bidang lainnya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan suatu reformasi dalam tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta menjadi cikal bakal lahirnya otonomi daerah di Indonesia termasuk adanya desentralisasi fiskal. Adanya otonomi daerah mampu mendorong semangat daerah untuk mengembangkan perekonomiannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyebutkan bahwa pembangunan harus memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, karena setiap daerah memiliki karakter baik itu sosial, budaya, bahkan geografis yang berbeda sehingga perlu kebijakan yang berbeda pula. Maka, kebijakan pembangunan ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi yang ada didaerahnya agar mampu mencapai hasil pembangunan yang optimal. Keberhasilan pembangunan ekonomi dilihat melalui pertumbuhan ekonominya, dimana pertumbuhan ekonomi dapat diukur salah satunya menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan ekonomi lokal di era otonomi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, secara otomatis menuntut pemerintah daerah untuk berorientasi secara global. Dikarenakan kondisi tingkat persaingan antar negara yang semakin tinggi dan tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada perekonomian di Indonesia khususnya di daerah. Oleh karena itu, tantangan pemerintah daerah bukan lagi pada otonomi maupun desentralisasi, melainkan daerah dituntut untuk meningkatkan daya saingnya yang merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa daya saing daerah sangat bergantung pada iklim usaha yang kondusif, keunggulan komparatif, dan keunggulan kompetitif daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan pada pemerintah kabupaten/kota, sehingga pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu mandiri didalam menyelenggarakan pemerintahan, menentukan kebijakan pembangunan serta pendanaan. Menurut Munir (2002), menyatakan bahwa kunci keberhasilan sistem desentralisasi melalui otonomi daerah dimana kebijakan pembangunan daerah ditekankan pada kekhasan karakteristik daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya fisik secara lokal (daerah).

Dengan perencanaan yang baik dan kebijakan yang tepat akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tersebut. Todaro (2000) mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, meningkatkan rasa harga diri dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih. Namun begitu harus diperhatikan bahwa pembangunan ekonomi tanpa pembangunan moral masyarakatnya dari sisi agama akan menjadi salah satu penyebab tidak berkembangnya pembangunan tersebut.

Pemerintahan dan pembangunan diseluruh Indonesia sudah memasuki otonomi daerah yang memiliki hakikat bahwa pengelolaan pembangunan diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi daerah tergantung pada potensi dan permasalahan pokok yang dialami oleh daerah yang bersangkutan. Menurut Sjafrizal (2008) mengatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja (*job creation*).

Jika dilihat dari kemakmuran suatu daerah, maka daerah satu tidak akan sama dengan daerah yang lainnya walaupun dalam satu provinsi. Kaum klasik berpandangan bahwa daerah yang memiliki atau kaya Sumber Daya Alam (SDA) akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan daerah yang miskin SDA. Perbedaan SDA tersebut merupakan modal awal dalam pembangunan yang selanjutnya harus terus dikembangkan. Selain mengandalkan SDA yang ada dibutuhkan juga sinergi dengan faktor-faktor lain seperti seperti (SDM) yang mengelola SDA, teknologi sebagai alat "*tools*" untuk mengelola SDA. Sehingga akan dihasilkan barang dan jasa yang baik dan berkualitas, yang akhirnya berdampak pada pendapatan daerah tersebut. Seketika terjadi *multiplier effect* dalam kegiatan perekonomian dan perputaran uang akan terjadi.

Tabel 1 terlihat bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran mendominasi sebesar 37,15% dari total PDRB yang berarti bahwa sektor ini merupakan sektor yang dapat digerakkan sebagai perekonomian utama Kota Sungai Penuh yang merupakan potensi ekonomi ideal yang patut dikembangkan dan dapat menjadi daya saing ekonomi bagi daerah lain. Sektor ini diharapkan mampu memberikan dampak berganda (*multiplier effect*) terhadap sektor ekonomi lain, yang mana para pelaku ekonomi dapat mengembangkan jenis usaha yang dilakukannya untuk dijual ke pasar yang tidak hanya berbentuk barang

melainkan bentuk lainnya seperti jasa-jasa. Sehingga dapat memberikan peluang bagi masyarakat, pemerintah dan swasta dalam melakukan peluang usaha. Selain sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor kedua yang mendominasi sebesar 32,41%, sektor jasa sebesar 14,46% dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 11,33%, meskipun sudah mengalami pemekaran selama lebih kurang 7 tahun akan tetapi Kota Sungai Penuh masih menjadi pusat kegiatan masyarakat dan pelayanan publik dan administrasi yang sama dengan Kabupaten Kerinci.

Tabel 1: Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kota Sungai Penuh Tahun 2014

No.	Sektor	Kontribusi (%)	Pertumbuhan
1.	Pertanian	10,96	-0,81
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,14	-6,67
3.	Industri Pengolahan	6,53	-2,54
4.	Listrik dan Air Minum	0,79	2,60
5.	Bangunan	5,36	1,32
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	37,15	8,21
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	32,41	21,20
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	11,33	2,35
9.	Jasa-jasa	14,46	2,55
PDRB		100	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh, Tahun 2014

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sektor ekonomi yang menjadi sektor potensial Kota Sungai Penuh, dan untuk mengetahui bagaimana pengembangan sektor potensial yang mendukung daya saing di Kota Sungai Penuh tahun 2012-2014.

TINJAUAN LITERATUR

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Arsyad, 2002). Prinsip-prinsip manajemen pembangunan yang pro-bisnis adalah antara lain : (1). **Menyediakan Informasi kepada Pengusaha**, Pemerintah daerah dapat memberikan informasi kepada para pelaku ekonomi di daerahnya ataupun di luar daerahnya kapan, dimana, dan apa saja jenis investasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang akan datang. Dengan cara ini maka pihak pengusaha dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan daerah yang diinginkan pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan dalam kegiatan apa usahanya akan perlu dikembangkan. Pemerintah daerah perlu terbuka mengenai kebijakan pembangunannya, dan informasi yang diterima publik perlu diupayakan sesuai dengan yang diinginkan, (2). **Memberikan Kepastian dan Kejelasan Kebijakan**, Salah satu kendala berusaha adalah pola serta arah kebijakan publik yang berubah-ubah sedangkan pihak investor memerlukan ada kepastian mengenai arah serta tujuan kebijakan pemerintah. Strategi pembangunan ekonomi daerah yang baik dapat membuat pengusaha yakin bahwa investasinya akan menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Perhatian utama calon penanam modal oleh sebab itu adalah masalah kepastian kebijakan. Pemerintah daerah akan

harus menghindari adanya tumpang tindih kebijakan jika menghargai peran pengusaha dalam membangun ekonomi daerah. Ini menuntut adanya saling komunikasi diantara instansi-instansi penentu perkembangan ekonomi daerah. Dengan cara ini, suatu instansi dapat mengetahui apa yang sedang dan akan dilakukan instansi lain, sehingga dapat mengurangi terjadinya kemiripan kegiatan atau ketiadaan dukungan yang diperlukan, (3). **Mendorong Sektor Jasa dan Perdagangan**, Sektor ekonomi yang umumnya berkembang cepat di kota-kota adalah sektor perdagangan kecil dan jasa. Sektor ini sangat tergantung pada jarak dan tingkat kepadatan penduduk. Persebaran penduduk yang berjauhan dan tingkat kepadatan penduduk yang rendah akan memperlemah sektor jasa dan perdagangan eceran, yang mengakibatkan peluang kerja berkurang. Semakin dekat penduduk, maka interaksi antar mereka akan mendorong kegiatan sektor jasa dan perdagangan. Seharusnya pedagang kecil mendapat tempat yang mudah untuk berusaha, karena telah membantu pemerintah daerah mengurangi pengangguran. Pada waktunya pengusaha kecil akan membayar pajak kepada pemerintah daerah. Dengan menstimulir usaha jasa dan perdagangan eceran, pertukaran ekonomi yang lebih cepat dapat terjadi sehingga menghasilkan investasi yang lebih besar, (4). **Meningkatkan Daya Saing Pengusaha Daerah**, Kualitas strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dilihat dari apa yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam menyiapkan pengusaha-pengusaha di daerahnya menghadapi persaingan global. Globalisasi (atau penduniaan) akan semakin mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah dengan berlakunya perjanjian AFTA, APEC dan lain-lain. Mau tidak mau, siap atau tidak siap perdagangan bebas akan menjadi satu-satunya pilihan bagi masyarakat di semua daerah. Upaya untuk menyiapkan pengusaha daerah oleh sebab itu perlu dilakukan, (6). **Membentuk Ruang yang Mendorong Kegiatan Ekonomi**, Membentuk ruang khusus untuk kegiatan ekonomi akan lebih langsung menggerakkan kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah perlu berusaha mengantisipasi kawasan-kawasan mana yang dapat ditumbuhkan menjadi pusat-pusat perekonomian wilayah. Kawasan-kawasan yang strategis dan cepat tumbuh ini dapat berupa kawasan yang sudah menunjukkan tanda-tanda aglomerasi, seperti sentra-sentra produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan; klaster industri dan sebagainya. Kawasan cepat tumbuh juga dapat berupa kawasan yang sengaja dibangun untuk memanfaatkan potensi SDA yang belum diolah, seperti yang dulu dikembangkan dengan sistim permukiman transmigrasi. Kawasan-kawasan ini perlu dikenali dan selanjutnya ditumbuhkan dengan berbagai upaya pengembangan kegiatan ekonomi, seperti pengadaan terminal agribisnis, pengerasan jalan, pelatihan bisnis, promosi dan sebagainya. Pengembangan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh ini perlu dilakukan bersamaan dengan upaya peningkatan keterampilan, pengembangan usaha, dan penguatan keberdayaan masyarakat.

Suatu daerah terbagi kedalam wilayah-wilayah atau sub-sub wilayah. Misalnya daerah provinsi dalam wilayah tersebut masih terbagi atas berbagai sub wilayah seperti kabupaten atau kota. Pertumbuhan daerah tersebut akan ditentukan oleh faktor-faktor utama yang antara lain : 1) sumber daya alam yang tersedia, 2) tersedianya modal bagi pengelolaan sumber daya alam, 3) adanya prasarana dan sarana (infrastruktur) yang menunjang seperti transportasi, komunikasi, 4) tersedianya teknologi yang tepat untuk pengelolaan sumber daya alam, dan 5) tersedianya kualitas sumber manusia untuk pengelolaan teknologi. Sumber daya alam dapat berupa lahan pertanian, bahan tambang atau galian yang dapat mendukung industri pengolahan atau sumber daya alam lainnya yang akan mempunyai arti penting bagi daerah yang memilikinya. Daerah tersebut akan berspesialisasi dalam suatu sub sektor atau sektor dan akan mempunyai keuntungan absolut bagi daerah lainnya, jika daerah tersebut dikelola secara baik dengan modal dan teknologi yang memadai maka daerah tersebut dapat diharapkan akan mengalami pertumbuhan dengan pesat. Soeparmoko (2002)

sebagai kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.

Soemihardjo (2008) menjelaskan bahwa pengembangan sektor unggulan yang dimiliki daerah tercermin pada visi dan misi daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Di dalam RPJPD dan RPJMD tampak bidang-bidang prioritas pada setiap program daerah kabupaten/kota dalam memperkokoh pengembangan sektor unggulan. Selain itu, APBD harus mencerminkan program-program dan tujuan-tujuan pembangunan. Karena suatu rencana akan bersifat operasional apabila anggarannya tersedia. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam pengembangan potensi daerah yang tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan dibidang pembangunan pada dasarnya adalah kunci keberhasilan pengembangan potensi ekonomi lokal untuk menguatkan daya saing daerah. Muktiyanto (2005) menjelaskan bahwa pendekatan yang umum dalam pengembangan potensi daerah dengan cara menelaah komponen PDRB, komponen sumber daya manusia, teknologi dan sistem kelembagaan. (Soemihardjo, 2008). Dalam menelaah PDRB dilakukan untuk mengetahui potensi basis dan non basis. Suatu daerah yang memiliki keunggulan memberikan kekhasan tersendiri yang tidak ada pada daerah lain, sehingga sektor unggulan tadi dapat dikatakan sebagai kegiatan basis (Triyuwono & Yustika, 2003).

Potensi Ekonomi Lokal (PEL) adalah usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah. Menurut A. H. J. Helming PEL (dalam Suparmoko, 2002) adalah suatu proses dimana kemitraan yang mapan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat dan dunia usaha mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang (pertumbuhan) ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Menekankan pada kontrol lokal, dan penggunaan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik. Adapun fokus PEL adalah 1) Peningkatan kandungan lokal; 2) Pelibatan *stakeholders* secara substansial dalam suatu kemitraan strategis; 3) Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi; 4) Pembangunan berkelanjutan; 5) Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal; 6) Pengembangan usaha kecil dan menengah; 7) Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif; 8) Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; 9) Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor dan antar daerah; 10) Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan. Sedangkan dimensi PEL adalah tidak merujuk pada batasan wilayah administratif tetapi lebih pada peningkatan kandungan komponen lokal maupun optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal. PEL sebagai inisiatif daerah yang dilakukan secara partisipatif. PEL menekankan pada pendekatan pengembangan bisnis, bukan pada pendekatan bantuan sosial yang bersifat karikatif. PEL bukan merupakan upaya penanggulangan kemiskinan secara langsung. PEL diarahkan untuk mengisi dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan pengembangan wilayah, perwilayahan komoditas, tata ruang, atau regionalisasi ekonomi.

PEL adalah usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah. Secara terperinci beberapa definisi PEL yang dapat di jelaskan dan pat dijadikan acuan antara lain : (1). World Bank, PEL sebagai proses yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, usahawan, dan organisasi non pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan

kerja di tingkat local, (2). Blakely and Bradshaw, PEL adalah proses dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan, (3). *International Labour Organization* (ILO), PEL adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya local dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi, dan (4). A. H. J. Helming, PEL adalah suatu proses dimana kemitraan yang mapan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang (pertumbuhan) ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Menekankan pada kontrol lokal, dan penggunaan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik.

Dimensi atau batasan PEL adalah : (1). Pengertian lokal yang terdapat dalam definisi PEL tidak merujuk pada batasan wilayah administratif tetapi lebih pada peningkatan kandungan komponen lokal maupun optimalisasi pemanfaatan sumberdaya local, (2). PEL sebagai inisiatif daerah yang dilakukan secara partisipatif, (3). PEL menekankan pada pendekatan pengembangan bisnis, bukan pada pendekatan bantuan sosial yang bersifat karikatif, (4). PEL bukan merupakan upaya penanggulangan kemiskinan secara langsung, dan (5). PEL diarahkan untuk mengisi dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan pengembangan wilayah, pelayahan komoditas, tata ruang atau regionalisasi ekonomi.

Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan ekonomi lokal di era otonomi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, secara otomatis menuntut pemerintah daerah untuk berorientasi secara global. Dikarenakan kondisi tingkat persaingan antar negara yang semakin tinggi dan tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada perekonomian di Indonesia khususnya di daerah. Oleh karena itu, tantangan pemerintah daerah bukan lagi pada otonomi maupun desentralisasi, melainkan daerah dituntut untuk meningkatkan daya saingnya. Abdullah dkk (2002) menjelaskan bahwa daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa daya saing daerah sangat bergantung pada iklim usaha yang kondusif, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah. Pembangunan daerah yang disesuaikan dengan kondisi potensi yang ada dan dengan prioritas program pemerintah yang mengarah pada pengembangan potensi ekonomi lokal akan mendapat hasil pembangunan yang optimal dan cepat, yang akan berdampak pula pada terciptanya kesejahteraan masyarakat termasuk didalamnya mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Secara otomatis pula akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga mempunyai posisi daya saing yang kuat pula. Indikator utama dan prinsip-prinsip penentu daya saing daerah salah satunya adalah perekonomian daerah.

Prinsip-prinsip Kinerja perekonomian daerah yang mempengaruhi daya saing daerah yakni (Abdullah, 2002) (a). Nilai tambah merefleksikan produktivitas perekonomian setidaknya jangka pendek, (b). Akumulasi modal mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing dalam jangka panjang, (c). Kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi dimasa lalu, dan (d). Kompetisi yang didorong mekanisme pasar akan meningkatkan kinerja ekonomi suatu daerah. Semakin ketat kompetisi pada suatu perekonomian daerah, maka akan semakin kompetitif perusahaan-perusahaan yang akan bersaing secara internasional maupun domestik.

Teknik *SWOT* ini menjadi cukup populer dalam penyusunan RPJMD suatu daerah dan Renstra untuk suatu dinas dan instansi pemerintah (*Renstra SKPD*), terutama setelah diberlakukannya otonomi daerah. Dalam era otonomi ini, setiap daerah sebenarnya saling bersaing satu sama lainnya dalam memajukan pembangunan di daerahnya masing-masing. Dalam kondisi persaingan yang demikian, maka teknik *SWOT* dirasakan sebagai salah satu teknik analisis, metode atau alat yang lebih tepat untuk penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD pada tingkat daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota (Sjafrizal : 2014).

Tabel 2 : Matrik SWOT Analysis Untuk Perumusan Strategi

EFAS IFAS	STRENGTHS (S) Tentukan faktor-faktor kekuatan internal	WEAKNESSES (W) Tentukan faktor-faktor kelemahan
OPPORTUNITIES (O) Tentukan faktor-faktor peluang eksternal	STRATEGI SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
THREATS (T) Tentukan faktor-faktor ancaman eksternal	STRATEGI ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber: Rangkuti (2006)

Dasar pemikiran teori basis ekonomi menurut Kadariah (2005) adalah karena industri basis menghasilkan barang dan jasa baik untuk pasar di dalam maupun di luar daerah, maka maka penjualan hasil keluar daerah itu akan mendatangkan arus pendapatan kedalam daerah tersebut. Arus pendapatan ini menyebabkan baik kenaikan konsumsi maupun kenaikan investasi di daerah itu, yang pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan kesempatan kerja. Jika di daerah itu ada pengangguran, maka kesempatan kerja yang baru itu dapat menampungnya, atau jika di daerah itu tidak terdapat pengangguran maka daerah itu mempunyai daya tarik bagi orang-orang dari luar daerah yang mencari pekerjaan. Kenaikan pendapatan itu tidak hanya menaikkan permintaan terhadap hasil industri basis melainkan juga akan menaikkan permintaan hasil industri lokal non basis dan permintaan ini selanjutnya akan menaikkan investasi di industri-industri non basis. Dengan kata lain penanaman modal di sektor-sektor lokal merupakan investasi sebagai akibat kenaikan pendapatan dari industri-industri basis. Bertambah banyaknya sektor basis di suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan terhadap barang dan jasa didalamnya, meningkatkan nilai investasi dan menimbulkan kenaikan volume kegiatan bukan basis. Dengan demikian sesuai dengan namanya kegiatan basis mempunyai peran sebagai penggerak pertama dimana setiap perubahan mempunyai efek multiplier terhadap perekonomian agregat. Berdasarkan gagasan inilah, maka para ahli berpendapat bahwa sektor-sektor basis inilah yang seharusnya dikembangkan disuatu daerah.

Mengingat dewasa ini tingkat persaingan antar daerah maupun dengan dunia internasional sudah semakin tajam, maka sesuai dengan prinsip dalam *Teori Ekonomi Regional*, maka potensi utama suatu daerah seharusnya dilihat dari sudut pandang Keuntungan Komperatif (*Comperative Avantage*) dari sektor, subsektor dan komoditi tertentu secara relatif terhadap daerah lain. Untuk dapat mengukur dan menentukan potensi pembangunan daerah secara relatif terhadap daerah lainnya, maka Koefisien Lokasi (*Location Quotient*) dapat digunakan. Secara teoritis, koefisien lokasi ini pada dasarnya adalah merupakan ukuran dari *Revealed Comperative Advantage* yang lazim muncul dalam

Ilmu Ekonomi Regional dan Perdagangan Internasional. Formula perhitungan *Location Quotient* tersebut adalah sebagai berikut (Sjafrizal, 2014) :

$$LQ_{ij} = [y_{ij} / \sum_i y_{ij}] : [\sum_j y_{ij} / \sum_i \sum_j y_{ij}]$$

dimana y_{ij} adalah nilai tambah produksi dan usaha i di wilayah j .

Indek koefisien lokasi lazim digunakan untuk mengukur potensi relatif dari suatu sektor atau subsektor terhadap perekonomian daerah dibandingkan dengan peranan sektor yang sama pada daerah-daerah lainnya (Tarigan, 2004). Sebagaimana terlihat pada formula LQ di atas, ruas pertama menghitung besarnya peranan suatu sektor dan subsektor terhadap perekonomian daerah bersangkutan. Sedangkan ruas kedua menghitung peranan sektor dan subsektor yang sama dalam perekonomian pada tingkat yang lebih besar baik provinsi maupun nasional. Dengan demikian, potensi relatif suatu sektor dan subsektor pada suatu kabupaten atau provinsi akan dapat diketahui dengan jalan membagi ruas pertama dengan ruas kedua. Sedangkan pengertian dari hasil perhitungan yang diperoleh nantinya adalah sebagai berikut: bila $LQ_{ij} > 1$, maka komoditi dan usaha tersebut mempunyai Keuntungan Kompetitif tinggi (unggul) dan demikian pula sebaliknya bila $LQ_{ij} < 1$.

Metode *Shift-Share* adalah salah satu teknik analisis dalam Ilmu Ekonomi Regional yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor utama yang mempengaruhi dan menentukan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Dalam hal ini faktor yang mempengaruhi tersebut dapat berasal dari luar daerah maupun dari dalam daerah bersangkutan sendiri. Faktor luar daerah dapat berasal dari perkembangan kegiatan ekonomi nasional maupun internasional yang dapat mempengaruhi karena terdapatnya hubungan ekonomi yang cukup erat dengan perekonomian nasional dan bahkan juga internasional. Sedangkan faktor yang berasal dari dalam daerah biasanya timbul dari struktur perekonomian daerah serta potensi khusus yang dimiliki daerah bersangkutan (Sjafrizal, 2014). Analisis *Shift-Share Analysis* ini terdapat pada beberapa buku teks Ilmu Ekonomi Regional, antara lain adalah John P. Blair (1991). Formulasi matematika model ini adalah sebagai berikut :

$$\Delta y_i = [y_i(Y^t/Y^o - 1)] + [y_i(Y_i^t/Y_i^o) - (Y^t/Y^o)] + [y_i(y_i/y_i^o) - (Y_i^t/Y_i^o)]$$

dimana Δy_i = perubahan nilai tambah sektor i ;

y_i^o = nilai tambah sektor i di daerah pada awal periode;

y_i^t = nilai tambah sektor i di daerah pada akhir periode;

Y_i^o = nilai tambah sektor i di tingkat nasional pada awal periode;

Y_i^t = nilai tambah sektor i di tingkat nasional pada akhir periode.

Formulasi persamaan diatas menunjukkan bahwa peningkatan nilai tambah suatu daerah dapat diuraikan (*decompose*) atas 3 bagian. Bagian pertama pada sisi kiri persamaan tersebut adalah : (1). *Regional Share* : $[y_i (Y^t/Y^o - 1)]$ adalah merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh dorongan faktor luar yaitu: peningkatan kegiatan ekonomi daerah akibat kebijaksanaan nasional yang berlaku pada seluruh daerah, atau karena dorongan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan pada daerah tetangga, (2). *Proportionality Shift (Mixed Shift)* : $[y_i (Y_i^t/Y_i^o) - (Y^t/Y^o)]$ adalah komponen pertumbuhan ekonomi dari dalam daerah sendiri yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang relatif baik, yaitu berspesialisasi pada sektor-sektor yang secara nasional dapat pertumbuhannya cepat seperti sektor industri, dan (3). *Differential Shift (Competitive Shift)* : $[y_i (y_i/y_i^o) - (Y_i^t/Y_i^o)]$ adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang bersifat kompetitif. Unsur pertumbuhan inilah yang merupakan Keuntungan Kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor daerah bersangkutan. Sebagai implikasi dari perbedaan struktur dan potensi ekonomi wilayah, pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah cenderung sangat bervariasi satu sama lainnya. Ada daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, tetapi ada pula yang relatif lambat dan bahkan ada pula yang mengalami stagnasi sama sekali. Kondisi

tersebut tentunya akan mempengaruhi pula tingkat kemakmuran masyarakat pada masing-masing daerah bersangkutan, ada yang telah berkembang menjadi daerah maju, daerah sedang berkembang dan ada pula masih merupakan daerah yang relatif masih terbelakang (Sjafrizal, 2014).

Pengelompokkan daerah menurut struktur pertumbuhan dan tingkat pembangunan ini antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan *Matrik Tipologi Klassen*. Dalam hal ini, pengelompokkan daerah dilakukan dengan menggunakan 2 indikator utama yaitu : laju pertumbuhan dan tingkat pendapatan perkapita. Dengan cara demikian, akan terdapat 4 kelompok daerah yaitu : (1) *Daerah Maju (Developed Region)* pada kuadran I dimana laju pertumbuhan dan pendapatan per kapita lebih tinggi dari rata-rata. (2) *Daerah Maju Tapi Tertekan* pada kuadran II dimana tingkat pendapatan per kapita daerah telah lebih tinggi dari rata-rata, tetapi laju pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari rata-rata. (3) *Daerah Berkembang* pada kuadran III dimana tingkat pendapatan per kapita masih berada dibawah rata-rata, tetapi laju pertumbuhan daerah ini telah berada di atas rata-rata. (4) *Daerah Terbelakang* pada kuadran IV dimana baik laju pertumbuhan maupun pendapatan per kapita daerah ini berada dibawah nilai rata-rata. Implikasi dari penggunaan Matriks Klassen Typology tersebut dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah antara lain dapat dilakukan sebagai berikut (Sjafrizal, 2014):

- a) Untuk kelompok *Daerah Maju*, kebijakan dan program pembangunan daerah sebaiknya lebih banyak diarahkan kepada sektor dan kegiatan ekonomi dan sosial yang menggunakan teknologi lebih modern dan padat modal seperti sektor industri dan jasa. Dengan cara demikian, produktivitas perekonomian daerah akan dapat lebih ditingkatkan.
- b) Untuk kelompok *Daerah Maju Tetapi Tertekan*, sebaiknya kebijakan dan program pembangunan untuk kelompok daerah ini diarahkan pada pemecahan masalah yang menyebabkan pertumbuhan daerah ini tertekan, misalnya penurunan harga komoditi unggulan daerah bersangkutan di pasaran dunia. Kebijakan yang dapat dilakukan anatara lain adalah dengan jalan mengalihkan pemasaran produk kegiatan utama daerah bersangkutan ke daerah lain.
- c) Untuk kelompok *Daerah Berkembang*, perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah sebaiknya diarahkan pada upaya untuk mendorong proses pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki daerah.
- d) Sedangkan untuk kelompok *Daerah Tertinggal*, perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah sebaiknya diarahkan pada upaya untuk meningkatkan penyediaan lapangan kerja melalui pemanfaatan teknologi padat karya. Sedangkan kegiatan ekonomi utama sebaiknya diarahkan pada kegiatan pertanian yang masih menggunakan teknologi tradisional, tetapi produknya mempunyai pasar yang cukup luas seperti tanaman pangan.

METODE PENELITIAN

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari literatur dan laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sungai Penuh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sungai Penuh dan sumber data lainnya dalam kurun waktu 3 tahun yakni tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

Dalam menganalisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah Di Kota Sungai Penuh, digunakan pendekatan sebagai berikut:

- 1) Analisis Location Quotient (LQ), Analisis Location Quotient (LQ), teknik analisis ini digunakan untuk menentukan kategori suatu sektor termasuk dalam sektor basis atau bukan basis. Formulasi dari teknik analisis tersebut (Sjafrizal : 2014) :

$$LQ = \frac{VA1J/VA1I}{PDRBJ/PDRBI}$$

Keterangan :

LQ Ji = Location Quotient sektor i di daerah J

VA Ji = Nilai tambah sektor i di daerah J

VA Ii = Nilai tambah sektor i di tingkat kabupaten

PDRB J = Produk Domestik Regional Bruto di daerah J

PDRB I = Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten

Dari hasil perhitungan yang diperoleh dapat diartikan dalam dua kategori, yaitu : Bila nilai LQ lebih kecil atau sama dengan 1, menunjukkan bahwa sektor tersebut bukan sektor basis, dan Bila nilai LQ lebih besar dari 1, menunjukkan bahwa sektor tersebut adalah sektor basis.

- 2) Analisis Shift-share (S-S), Analisis Shift-Share Analysis ini terdapat pada beberapa buku teks Ilmu Ekonomi Regional, antara lain adalah John P. Blair (dalam Sjafrizal, 2014). Formulasi matematika model ini adalah $\Delta y_i = [y_i(Y^t/Y^o-1)]+[y_i(Y_i^t/Y_i^o)-(Y^t/Y^o)]+[y_i(y_i/y_i^o) - (Y_i^t/Y_i^o)]$

dimana :

Δy_i = perubahan nilai tambah sektor i

y_i^o = nilai tambah sektor i di daerah pada awal periode

y_i^t = nilai tambah sektor i di daerah pada akhir periode

Y_i^o = nilai tambah sektor i di tingkat nasional pada awal periode

Y_i^t = nilai tambah sektor i di tingkat nasional pada akhir periode.

Formulasi pada persamaan diatas menunjukkan bahwa peningkatan nilai tambah suatu daerah dapat diuraikan (*decompose*) atas 3 bagian. Bagian pertama pada sisi kiri persamaan tersebut adalah : (1). *Regional Share*: $[y_i (Y^t/Y^o-1)]$ adalah merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh dorongan faktor luar yaitu : peningkatan kegiatan ekonomi daerah akibat kebijaksanaan nasional yang berlaku pada seluruh daerah, atau karena dorongan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan pada daerah tetangga, (2). *Proportionality Shift (Mixed Shift)*: $[y_i (Y_i^t/Y_i^o)-(Y^t/Y^o)]$ adalah komponen pertumbuhan ekonomi dari dalam daerah sendiri yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang relatif baik, yaitu berspesialisasi pada sektor-sektor yang secara nasional dapat pertumbuhannya cepat seperti sektor industri dan (3). *Differential Shift (Competitive Shift)* : $[y_i (y_i/y_i^o) - (Y_i^t/Y_i^o)]$ adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang bersifat kompetitif.

- 3) Teknik Analisis SWOT, Dalam era otonomi ini, setiap daerah sebenarnya saling bersaing satu sama lainnya dalam memajukan pembangunan di daerahnya masing-masing. Dalam kondisi persaingan yang demikian, maka teknik *SWOT* dirasakan sebagai salah satu teknik analisis, metode atau alat yang lebih tepat untuk penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD pada tingkat daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota (Sjafrizal, 2014).
- 4) Tipologi Klassen, Pengelompokan daerah dilakukan dengan menggunakan 2 indikator utama yaitu : laju pertumbuhan dan tingkat pendapatan perkapita. Dengan cara demikian, akan terdapat 4 kelompok daerah yaitu: (1) *Daerah Maju (Developed Region)* pada kuadran I dimana laju pertumbuhan dan pendapatan per kapita lebih tinggi dari

rata-rata. (2) *Daerah Maju Tapi Tertekan* pada kuadran II dimana tingkat pendapatan perkapita daerah telah lebih tinggi dari rata-rata, tetapi laju pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari rata-rata. (3) *Daerah Berkembang* pada kuadran III dimana tingkat pendapatan per kapita masih berada dibawah rata-rata, tetapi laju pertumbuhan daerah ini telah berada di atas rata-rata. (4) *Daerah Terbelakang* pada kuadran IV dimana baik laju pertumbuhan maupun pendapatan per kapita daerah ini berada dibawah nilai rata-rata. Pengelompokkan daerah berdasarkan Tipologi Klassen tersebut dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel 3: Pengelompokkan Ekonomi Daerah Berdasarkan Tipologi Klassen

Laju Pertumbuhan Pendapatan Pekapita	Laju Pertumbuhan Di atas Rata-Rata	Laju Pertumbuhan Di bawah Rata-Rata
Pendapatan Perkapita Diatas Rata-Rata	<i>Daerah Maju</i>	<i>Daerah Maju Tapi Tertekan</i>
Pendapatan Perkapita Dibawah rata-Rata	<i>Daerah Berkembang</i>	<i>Daerah Tertinggal</i>

Sumber : Sjafrizal (2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 4: Hasil Perhitungan LQ Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2014

No.	URAIAN	LQ 2012	LQ 2013	LQ 2014	Rata-rata
1.	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	0,92	1,16	0,74	0,94
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,04	0,04	0,04	0,04
3.	Industri Pengolahan	1,68	1,68	1,63	1,66
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	0,20	0,19	0,20	0,20
5.	Bangunan	1,26	1,32	1,34	1,31
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,21	7,31	7,29	7,27
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	5,40	5,41	5,31	5,37
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2,76	2,77	2,83	2,79
9.	Jasa-jasa	3,50	3,53	3,61	3,55

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2015

Dengan menggunakan data PDRB Kota Sungai Penuh dan data PDRB Provinsi Jambi Maka dapat dihitung nilai LQ dari Kota Sungai Penuh pada Tabel 4 hasil LQ diketahui tiga sektor yang paling potensial untuk dikembangkan adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan nilai LQ tahun 2012 sebesar 7,21 tahun 2013 sebesar 7,31 tahun 2014 sebesar 7,29. Kemudian disusul dengan sektor Pengangkutan dan Komunikasi dengan nilai LQ tahun 2012 sebesar 5,40 tahun 2013 sebesar 5,41 tahun 2014 sebesar 5,31. Posisi ketiga adalah sektor Jasa-jasa dengan nilai LQ tahun 2012 sebesar 3,50 tahun 2013 sebesar 3,53 tahun 2014 sebesar 3,61. Jika sektor-sektor tersebut dikembangkan oleh pemerintah daerah dengan dukungan kebijakan dan mendapat prioritas program maka sektor-sektor tersebut akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran menjadi potensi andalan utama yang memiliki daya saing daerah yang harus dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *Regional Share* adalah sebesar Rp. 78.372,014 juta (5,85%) yang menunjukkan kontribusi faktor dari luar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh. Hal ini berarti bahwa kontribusi dan peranan pemerintah pusat dan kegiatan ekonomi daerah tetangga tidak begitu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota

Sungai Penuh. Hal yang cukup menarik adalah bahwa nilai *Proportionality Shift* ternyata cukup besar, yaitu mencapai Rp. 634.508,104 juta (47,35%) yang berarti bahwa struktur perekonomian Kota Sungai Penuh mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ini berarti bahwa sektor-sektor yang dikembangkan dalam kegiatan ekonomi daerah ternyata cukup unggul dalam arti bahwa sektor tersebut bertumbuh cepat secara nasional. Nilai *Differential Shift* yang diperoleh sebesar Rp. 627.041,767 Juta yang berarti sumbangan potensi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah cukup besar (46,80%) dan bahkan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kenyataan ini cukup logis karena Kota Sungai Penuh memang mempunyai potensi khusus yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara cepat seperti pusat perdagangan dan pendidikan yang dapat menarik masyarakat dari daerah lain diluar Kota Sungai Penuh untuk mendapatkan pelayanan publik disini.

Tabel 5: Hasil Perhitungan *Shift Share* Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2014

N o.	URAIAN	<i>Regional Share</i>	<i>Proportionality Share</i>	<i>Differential Shift</i>	<i>Shift Share</i>
1.	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	9.125,86	73.134,51	73.014,59	155.274,96
2.	Pertambangan dan Penggalian	117,49	940,46	938,917	1.996,87
3.	Industri Pengolahan	5.290,14	42.394,63	42.325,11	90.009,88
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	642,58	5.148,52	5.140,08	10.931,18
5.	Bangunan	3.963,68	31.764,22	31.712,13	67.440,03
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	22.635,62	181.403,18	181.105,71	385.144,52
7.	Pengangkutan & Komunikasi	16.950,11	135.838,91	135.616,22	288.405,20
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	8.657,65	69.382,21	69.268,44	147.308,30
9.	Jasa-Jasa	10.988,89	94.501,48	87.920,59	193.410,96
	JUMLAH	78.372,014	634.508,10	627.041,77	1.339.921,89
	%	5,85	47,35	46,80	

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2015

Kota Sungai Penuh memiliki potensi baik secara internal maupun eksternal, yang apabila dapat digali dan dikembangkan oleh pemerintah daerah secara optimal, maka potensi-potensi tersebut dapat menjadi peluang bagi daerah, adapun potensi internal maupun eksternal yang dapat dijadikan peluang daya saing bagi daerah adalah:

- 1) Kota Sungai Penuh merupakan kota kedua yang ada di Provinsi Jambi, memiliki pusat perbelanjaan yang cukup besar, baik bagi masyarakat kota maupun masyarakat yang berada disekitar kota yang dapat dijadikan sebagai pusat perdagangan dan jasa.
- 2) Kota Sungai Penuh merupakan sentra pendidikan baik sekolah unggulan tingkat SMU, SMP, SD dan pendidikan usia dini. Selain itu, sudah banyak berdiri perguruan tinggi yang berbentuk sekolah tinggi dan akademi. Perguruan tinggi ini banyak menyerap mahasiswa yang berasal dari luar Kota Sungai Penuh dan dari luar Provinsi Jambi.
- 3) Kota Sungai Penuh merupakan pusat kegiatan administrasi daerah dalam melakukan kegiatan pelayanan dan jasa.

Selain dari segi peluang, banyak juga sisi kelemahan yang dimiliki oleh Kota Sungai Penuh diantaranya :

- 1) Wilayah Kota Sungai Penuh relatif sempit karena berada mengelilingi Kabupaten Kerinci, sehingga sulit untuk dikembangkan bagi aktivitas pertanian maupun pariwisata alam.
- 2) Status kepemilikan asset daerah belum jelas, meskipun daerah merupakan milik Kota Sungai Penuh, tetapi dari segi asset daerah masing ditempatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kerinci.
- 3) Infrastruktur yang dimiliki masih kurang baik sebagai akses untuk memasuki wilayah kota, karena ketersediaan anggaran yang masih minim dan sebagian besar bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

Secara umum dikatakan kekuatan, apabila kondisi internal tersebut menjadi pendorong keberhasilan sistem dan kelemahan apabila kondisi internal tersebut menjadi hambatan bagi sistem. Sedangkan peluang, apabila kondisi eksternal menjadi pendorong keberhasilan sistem dan ancaman, apabila kondisi eksternal menjadi hambatan keberhasilan sistem. Sebelum melakukan analisis SWOT, perlu melakukan evaluasi terhadap faktor internal dan faktor eksternal. Matriks SWOT merupakan *matching tools* yang penting untuk membantu dalam mengembangkan empat tipe strategi, yaitu:

1. SO Strategies: dimana kekuatan internal sistem digunakan untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar sistem. Fasilitas kota yang dimiliki oleh Kota Sungai Penuh dapat digunakan untuk menambah pendapatan kota yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kota, seperti pembangunan pasar yang merupakan pasar induk bagi Kota Sungai Penuh dan daerah disekitarnya, peran kreativot dan inovator dari pihak pemerintah sangat menunjang keberhasilan strategi ini.
2. WO Strategies: bertujuan untuk memperkecil kelemahan internal sistem dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal. Pemerintah mengontrak Rumah/Toko milik masyarakat yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pelayanan publik dengan baik, Pemerintah harus menggalakkan investasi di sektor riil terutama lokasi pasar dan tempat wisata yang diharapkan selain meningkatkan pendapatan asli daerah lewat pajak dan retribusi juga menyerap tenaga kerja memanfaatkan dana perimbangan dan dana pendamping APBD Kota Sungai Penuh.
3. ST Strategies: dimana sistem berusaha agar mampu menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal. Perlunya memaksimalkan PAD dengan menggali potensi daerah. Perangkat daerah perlu ditata kembali sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi otonomi daerah. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pemerintah, sehingga mampu secara maksimal memberikan pelayanan publik.
4. WT Strategies: merupakan taktik untuk bertahan yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari dari ancaman-ancaman lingkungan. Diperlukan organisasi dan pola manajemen yang baik. Hal ini meliputi perbaikan dalam Sumber Daya Aparatur, Sumber Daya Masyarakat, Sumber Daya Organisasi Perangkat.

Tabel 6: Matriks SWOT Kota Sungai Penuh

IFAS EFAS	STRENGTHS (S) Kota Sungai Penuh merupakan pusat kota dimana terdapat fasilitas-fasilitas lengkap untuk melakukan kegiatan baik urusan pemerintahan, ekonomi, pendidikan.	WEAKNESSES - Belum diserahkannya seluruh asset dari daerah induk yaitu Kabupaten Kerinci, - Dana Alokasi Umum (DAK) dan (DAU) yang masih sangat minim untuk membangun infrastruktur, - Masih banyak penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar pendidikan dan pengalaman kerja.
OPPORTUNITIES (O) Kota Sungai Penuh memiliki pusat kegiatan ekonomi berupa pasar induk bagi Kota Sungai Penuh itu sendiri dan bagi kabupaten disekitar kota sehingga menjadi mobilitas ekonomi bagi masyarakat.	STRATEGI SO Fasilitas kota yang dimiliki oleh Kota Sungai Penuh dapat digunakan untuk menambah pendapatan kota yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kota dari kegiatan pasar oleh masyarakat Kota Sungai Penuh dan masyarakat disekitar kota.	STRATEGI WO Pemerintah mengontrak Rumah/Toko milik masyarakat yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pelayanan publik dengan baik, Pemerintah harus menggalakkan investasi di sektor riil terutama lokasi pasar dan tempat wisata yang diharapkan selain meningkatkan pendapatan asli daerah lewat pajak dan retribusi juga menyerap tenaga kerja dan memanfaatkan dana perimbangan dan dana pendamping APBD Kota Sungai Penuh.
THREATS (T) Sumber daya kota yang dimiliki oleh Kota Sungai Penuh tanpa dilakukan perbaikan melalui pemikiran kreatif dan inovatif akan membuat Kota Sungai Penuh menjadi kota mati karena dalam perluasan lahan untuk membangun ekonomi kota dirasakan tidak mungkin, selain berada diantara Kabupaten Kerinci, sebagian besar wilayah termasuk kedalam TNKS yang tidak boleh diolah.	STRATEGI ST Perlunya memaksimalkan PAD dengan menggali potensi daerah. Perangkat daerah perlu ditata kembali sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi otonomi daerah. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pemerintah, sehingga mampu secara maksimal memberikan pelayanan publik.	STRATEGI WT diperlukan organisasi dan pola manajemen yang baik.. Hal ini meliputi perbaikan dalam Sumber Daya Aparatur, Sumber Daya Masyarakat, Sumber Daya Organisasi Perangkat.

Sumber: Data Sekunder, diolah Tahun 2015

Tabel 7: Klasifikasi Sektor PDRB Kota Sungai Penuh Berdasarkan Typology Klassen Tahun 2012-2014

KUADRAN I	KUADRAN II
Sektor yang maju dan tumbuh cepat pesat (<i>developed sector</i>) $S_i > S$ dan $S_{ki} > S_k$ - Pengangkutan dan Komunikasi	Sektor yang maju tapi tertekan (<i>stagnant sector</i>) $S_i < S$ dan $S_{ki} > S_k$ - Listrik, Gas dan Air Minum - Perdagangan, Hotel dan Restoran - Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan - Jasa-Jasa
KUADRAN III	KUADRAN IV
Sektor potensial atau masih dapat berkembang (<i>developing sector</i>) $S_i > S$ dan $S_{ki} < S_k$	Sektor relatif tertinggal (<i>underdeveloped sector</i>) $S_i < S$ dan $S_{ki} < S_k$ - Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan - Pertambangan dan Penggalian - Industri pengolahan - Bangunan

Sumber : Data Sekunder, diolah Tahun 2015.

Berdasarkan hasil pengelompokan dengan *Klassen Typology* seperti terlihat pada diatas yang menggunakan rata-rata laju pertumbuhan PDRB dan kontribusi PDRB Kota Sungai Penuh dan Provinsi Jambi, hanya sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang termasuk dalam klasifikasi daerah yang maju dan tumbuh cepat. Pada daerah maju tapi tertekan terdapat empat sektor yaitu Listrik, Gas dan Air Minum, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta Jasa-Jasa. Pada klasifikasi sektor potensial atau masih dapat berkembang tidak terdapat satu pun sektor yang termasuk kedalam kuadran ini, karena dari hasil perhitungan terlihat bahwa tidak ada sektor yang memiliki kriteria rata-rata pertumbuhan sektor di Kota Sungai Penuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan sektor Provinsi Jambi sedangkan rata-rata kontribusi sektor di Kota Sungai Penuh lebih rendah dari rata-rata kontribusi sektor di Provinsi Jambi. Sektor relatif tertinggal adalah sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan dan Bangunan yang disebabkan karena dari hasil hasil perhitungan terlihat bahwa sektor-sektor ini memiliki rata-rata pertumbuhan dan rata-rata kontribusi di Kota Sungai Penuh adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan sektor-sektor ini di Provinsi Jambi. Kota Sungai Penuh yang memiliki keterbatasan wilayah membuat sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian serta Industri Pengolahan dan Bangunan tidak memiliki potensi untuk dapat dikembangkan dari aspek keruangannya sehingga membuat sektor-sektor ini relatif ditinggalkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh kesimpulan:

- a) Berdasarkan perhitungan LQ diketahui tiga sektor yang paling potensial untuk dikembangkan adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan nilai LQ tahun

2012 sebesar 7,21 tahun 2013 sebesar 7,31 tahun 2014 sebesar 7,29. Kemudian disusul dengan sektor Pengangkutan dan Komunikasi dengan nilai LQ tahun 2012 sebesar 5,40 tahun 2013 sebesar 5,41 tahun 2014 sebesar 5,31. Posisi ketiga adalah sektor Jasa-jasa dengan nilai LQ tahun 2012 sebesar 3,50 tahun 2013 sebesar 3,53 tahun 2014 sebesar 3,61.

- b) Nilai *Proportionality Shift* ternyata cukup besar yaitu mencapai Rp. 634.508,104 juta (47,35%) yang berarti bahwa sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Kota Sungai Penuh mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Nilai *Differential Shift* yang diperoleh sebesar Rp. 627.041,767 Juta yang berarti sumbangan potensi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah sangat besar (46,8%).
- c) Dari strategi SO, fasilitas kota yang dimiliki oleh Kota Sungai Penuh dapat digunakan untuk menambah pendapatan kota yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kota dari kegiatan pasar oleh masyarakat Kota Sungai Penuh dan masyarakat disekitar kota.
- d) Berdasarkan hasil pengelompokan dengan *Klassen Typology* yang menggunakan rata-rata laju pertumbuhan PDRB dan kontribusi PDRB Kota Sungai Penuh dan Provinsi Jambi, hanya sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang termasuk dalam klasifikasi daerah yang maju dan tumbuh cepat. Pada daerah maju tapi tertekan terdapat empat sektor yaitu Listrik, Gas dan Air Minum, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta Jasa-Jasa. Pada klasifikasi sektor potensial atau masih dapat berkembang tidak terdapat satu pun sektor yang termasuk kedalam kuadran ini karena $S_i > S$ dan $S_{ki} < S_k$ atau rata-rata pertumbuhan Kota Sungai Penuh besar dari rata-rata pertumbuhan Provinsi Jambi dan Rata-rata kontribusi Kota Sungai Penuh kecil dari rata-rata kontribusi Provinsi Jambi. Sektor relatif tertinggal adalah sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan dan Bangunan.
- e) Sampai 2014 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran menjadi potensi andalan utama yang memiliki daya saing daerah yang harus dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Kota Sungai Penuh dengan menggunakan rata-rata laju pertumbuhan PDRB dan kontribusi PDRB Kota Sungai Penuh dan Propinsi Jambi. Daya saing daerah tergantung pada iklim usaha yang Kondusif, keunggulan Kompratif dan keunggulan Kompetitif daerah. Perdagangan Hotel dan Restoran salah satunya dapat dilakukan dengan kebijakan bagi kemudahan investasi untuk para investor dan penambahan pendirian pusat-pusat perdagangan baru dan penambahan pasar-pasar baru serta pembangunan hotel dan restoran baru. Secara otomatis pula akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga mempunyai posisi daya saing yang kuat pula. Indikator utama prinsip-prinsip daya saing daerah salah satunya adalah perekonomian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P., Alisjahbana, A., Effendi, N., Boediono. 2002. Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia. BPFE.Yogyakarta.
- Arsyad Lincolin. 2002. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Sungai Penuh Dalam Angka 2015.
- Kadariah. 2005. Ekonomi Perencanaan. Lembaga Penerbit FE-UI : Jakarta.
- Munir. 2002. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. (1st ed.), Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

- Muktianto. 2005. Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi Antardaerah. Prisma, No. 3.
- Rangkuti, Freddy. 2006. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional dan Perkotaan. Rajawali Press : Jakarta.
- _____. 2014. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemihardjo. 2008. Analisis Spasial dan Regional (Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia. UPP AMPYKPN : Yogyakarta.
- Soepono, Prasetyo. 2000. Model Gravitasi sebagai Alat Pengukur Hinter Land dari Central Place suatu Tinjauan Teoritik, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 15 No. 4.
- Soeparmoko 2002. Teori Lokasi: Representasi Landasan Mikro Bagi Teori Pembangunan Daerah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 No.4.
- Tarigan, Robinson. 2004. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjokroamidjojo. 2002. Analisis Kota dan Daerah, Edisi ketiga, ITB Bandung.
- Todaro, Michael, P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Ketujuh (diterjemahkan oleh Haris Munandar), Erlangga, Jakarta.
- Triyono dan Yustika. 2003. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan PDRB Perkapita Antar Kecamatan Di Kabupaten Banyumas (1993-2000), Tesis S-2 Program Pascasarjana UGM, Tidak dipublikasikan.